

Persatuan Bangsa Merupakan Cita-cita Utama Wanita Indonesia

Supeni

Ketua Umum Persatuan Nasional Indonesia

Apakah politik yang Anda geluti merupakan ajang aktualisasi diri ataukah sekadar obsesi?

Saya masuk ke dalam organisasi Indonesia Muda di Blitar saat berumur 14 tahun pada tahun 1931. Saya diminta menjadi pengurus dan bersedia menjadi Wakil Ketua Indonesia Muda cabang Blitar merangkap Ketua Keputrian Indonesia Muda cabang Blitar. Semula saya anggap biasa, anak muda ikut mencebur dalam sebuah perkumpulan yang mengikuti berbagai macam situasi melalui koran, majalah, dan pidato pemimpin nasional yang memperjuangkan Indonesia merdeka. Perlahan-lahan perjuangan untuk Indonesia merdeka turut menjadi obsesi saya. Karena kegiatan di Indonesia Muda, saya dikeluarkan dari HIK (Hollands Inlandse Kweekschool) Blitar setelah lulus ujian naik ke kelas III, dengan catatan tidak baik untuk menjadi calon guru karena berpolitik. Saya kemudian meneruskan studi ke HIK Muhammadiyah Solo dan tamat dengan menempuh ujian negeri. Selama di Solo meneruskan perjuangan di Indonesia Muda cabang Solo.

Anda saat itu belum masuk partai politik?

Waktu itu saya belum masuk partai politik karena ada ketentuan bahwa anggota partai politik adalah mereka yang sudah berumur 18 tahun. Ketika menginjak usia itu, karena obsesi Indonesia merdeka, saya ingin pula masuk partai politik. Saat itu banyak pemimpin pergerakan nasional yang dipenjarakan penguasa kolonial Belanda. Bahkan pada zaman pendudukan militer Jepang semua partai politik dibubarkan. Bila sebelumnya berobsesi ingin merdeka yang kemudian

berhasil dicapai oleh proklamasi 1945, terus merasa bahwa Belanda akan menjajah kembali, maka obsesi yang lahir berupa mempertahankan kemerdekaan. Setelah semua berlalu, sudah tidak ada obsesi.

Bagaimana kegiatan wanita di masa silam dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan mereka sekarang?

Iklimnya memang lain. Musuh yang dulu dihadapi lebih jelas yakni bule penjajah atau Jepang penindas. Sekarang ini anda boleh setuju atau tidak setuju dengan pemerintah Orde Baru, tetapi harus pula diingat bahwa mereka sama-sama bangsa Indonesia. Terpenting kita telah mempunyai pemerintahan bangsa sendiri. Karena itu perjuangan yang dilakukan tentu lain. Pemerintah sendiri mencanangkan akan membangun negara. Hal ini harus turut menjadi pertimbangan kaum wanita untuk melakukan perjuangan. Pembangunan, setelah kedaulatan negara diakui, juga dilakukan pemerintah walaupun masih banyak menemui hambatan terutama yang disebabkan oleh bangsa kita sendiri, misalnya PRRI, Permesta, Darul Islam, dan lain-lain. Saat itu kita tidak menghadapi kolonialis, tetapi ketidakcocokan dalam membangun negara. Apakah anda tidak setuju dengan pelaksanaan pemerintahan atau apakah memang mau mencapai kepentingan nasional atau tidak. Anda dan saya mungkin berbeda cara dalam membangun. Tetapi semuanya untuk kepentingan Indonesia. Harus ada kearifan dan jangan menganggap satu sama lain sebagai musuh.

Artinya, politik persatuan kini menjadi obsesi Anda...

Obsesi saya adalah menggalang agar persatuan tetap tinggi. Sebagai orang yang mengikuti perjuangan bangsa sejak tidak ada menjadi ada, tentu akan sedih melihat perpecahan. Kita semua mengetahui bahwa perpecahan justru akan merugikan kepentingan nasional. Karena itu saya sangat menginginkan dan merindukan persatuan bangsa supaya kesatuan negara republik tetap bisa dipertahankan. Barangkali siapa yang akan meneruskan semua bisa dikatakan merupakan obsesi saya supaya Indonesia dalam keadaan utuh, bersatu, maju, dan kuat.

Apa kaitannya antara organisasi yang Anda pimpin sekarang dengan nama sebuah partai politik?

Saya memimpin sebuah organisasi yang kebetulan namanya saja mirip dengan PNI yang pernah hidup. Sebetulnya kita tidak mau nama Persatuan Nasional Indonesia disingkat. Kami pun telah membuat penerbitan dengan nama lengkap *Suara Persatuan Nasional*. Orang menganggap dan merasa Persatuan Nasional Indonesia seperti ada kaitannya dengan PNI karena kebetulan dipimpin oleh saya yang sudah telanjur di cap banteng atau PNI. Kalau Anda yang memimpin pasti tidak akan dikatakan atau disamakan dengan PNI meskipun namanya Persatuan Nasional. Pengertian nasional ada dalam bangsa, janganlah kemudian diidentikkan dengan PNI. Persatuan nasional adalah persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Karena itu siapapun yang memimpin Persatuan Nasional Indonesia, entah pria atau wanita, tidak ada bedanya. Keduanya hebat dalam memimpin. Saya sendiri, karena faktor usia, sebetulnya sudah tidak sanggup memimpin dan menghendaki yang muda-muda maju ke depan. Meskipun awalnya tidak bersedia, tetapi didesak terus-menerus oleh kalangan muda, saya berpikir di mata dan perasaan kalau iklim persatuan bangsa sudah baik, mungkin mereka tidak akan mendorong-dorong lagi.

Apa saja wujud konkret perjuangan politik masa silam?

Bagi wanita atau pria politikus tidak ada masalah karena tujuannya hanya satu: Wanita



Supeni

(Repro: SINAR)

dan pria ibarat sayap kiri dan sayap kanan burung Garuda yang memungkinkannya terbang ke angkasa. Cita-cita yang menghendaki dedikasi dan perjuangan membuat orang berani, misalnya, masuk penjara atau ditembak mati. Sehingga saat mengetahui bahwa Ibu Rasuna Said atau Ibu S.K. Trimurti masuk penjara, saya yang belum matang turut hanyut dan menyatakan bersedia seperti mereka. Pemimpin-pemimpin nasional masa itu selalu bicara bahwa setiap korban akan ada hasilnya kelak. Kita ingin menyumbang agar perjuangan berhasil dengan saya menjadi korban. Ini adalah perasaan waktu itu. Berjuang juga dilakukan bersama-sama dengan kaum pria.

Contoh lain, wanita sangat dibutuhkan di garis belakang dan di garis depan pada zaman revolusi. Apapun dilakukan untuk membantu perjuangan. Kita mengisi dapur umum di garis belakang dengan mencari dan mengumpulkan gula, kopi, beras, dan makanan lain yang disisakan balatentara Jepang. Ketika menjadi Ketua Kowani daerah Madiun, saya menanak tiga jumptut beras yang ditaruh di dalam *kendil*, cara yang sejak lama telah diajarkan kaum ibu. Beras dan makanan awet lainnya, dibantu beberapa ibu,

dikumpulkan seminggu sekali dikirim ke laskar yang berjuang di garis depan. Agar pejuang tidak digigit nyamuk, kami mencari dan mengirim kelambu. Hampir setiap hari mengalir jenazah para pejuang yang gugur di front Jawa Timur. Tugas kita adalah mengurus secara langsung keluarga serta anak-anak pejuang itu. Bayangkan saja bagaimana bisa ditangani dengan baik bila tidak ada kaum wanita yang melakukannya.

Apakah pengalaman-pengalaman masa itu mempunyai manfaat?

Karena terbiasa merasakan dan melakukan, kita pun menjadi lebih berani dan mandiri. Contohnya, ketika saya menjadi Duta Besar Keliling Republik Indonesia, dengan tugas menyiapkan KTT Non-Blok I, hendak berangkat ke Etiophia. Pegawai kedutaan Indonesia di Etiophia mengatakan kepada Duta Besar bahwa Ibu Supeni tidak jadi datang karena terjadi pemogokan pekerja pelabuhan udara di Mesir sehingga pesawat yang hendak membawa saya tidak dapat berangkat. Namun Dubes, yang sangat mengetahui siapa sebenarnya saya pada tahun 1945-1950, mengatakan bahwa naik becak pun Ibu Supeni akan tiba di tujuan. Memang para pejuang pada masa revolusi fisik tidak meremehkan kita. Mereka merasa tanpa kita akan kerepotan. Ada wanita yang waktu itu tidak menghargai perjuangan, namun ada pula yang terus terang mengatakan tak bisa berjuang karena kendala tertentu.

Bagaimana kaitan antara perjuangan dan pendidikan politik saat ini?

Suasananya sudah lain. Perjuangan sekarang adalah untuk membangun. Pendidikan politik, jangankan untuk wanita, untuk pria pun masih jarang. Soalnya bukan hanya wanita. Mereka yang belajar dan tamatan perguruan tinggi memperoleh ilmu yang hebat dengan bahan-bahan referensi dari luar negeri. Kemajuan sudah diperoleh di berbagai bidang ilmu dan profesi. Di sisi lain, sejauh yang kita ketahui, Pancasila sudah diakui dan diterima sebagai asas negara dan bangsa. Tetapi tidak semua orang bisa diajak bicara asas-asas Pancasila padahal mereka sudah ditatar. Landasan mereka tidak kokoh. Mi-

salnya, apakah ilmu yang diberikan seorang pakar ekonomi berpijak pada Pancasila. Apakah budaya yang ada telah berpijak pada Pancasila yang diakui lahir dari bumi Indonesia?

Bagaimana penilaian Anda tentang kualitas wanita politikus Indonesia saat ini?

Kualitas politikus wanita Indonesia, bila dilihat mereka yang berbicara masalah-masalah penting di DPR, tidak tampak. Mungkin sistem yang dipakai sudah lain sehingga suara mereka menjadi semakin tidak terdengar. Ketua fraksi merupakan figur cukup penting untuk menentukan siapa yang harus berbicara. Yang lain hanya menjadi penonton atau paling-paling ikut masuk dalam sebuah komisi. Mereka tidak memikirkan apa yang dicita-citakan dan diperjuangkan oleh partai, tetapi terserah pada keputusan ketua fraksi. Yang berperan di situ tentunya orang yang sudah ditunjuk.

Artinya, sistem yang sekarang berlaku malah membuat orang kurang diasah?

Memang berbeda dengan zaman dulu. Saat menjadi anggota parlemen sejak 1956 sampai 1960, saya dan beberapa wanita dalam parlemen seringkali dicap paling tajam karena memperjuangkan segala hal. Misalnya, meskipun partai menentukan fraksi untuk berbicara masalah tertentu, tetapi komisi-komisi dalam sidang pleno boleh bebas berbicara apa saja. Mengenai masalah luar negeri, saya yang kebetulan menjabat Ketua Seksi Luar Negeri DPR, diundang untuk membuat usul atau resolusi. Misalnya saat muncul isu Nasionalisasi Terusan Suez atau Hongaria diduduki Uni Soviet. Saya langsung membuat draft yang ditawarkan dan disetujui seksi luar negeri serta dibawa ke sidang pleno dan semua secara aklamasi setuju. Saya bergerak meskipun bukan ketua fraksi. Contoh lain mengenai soal ekonomi. Bapak Wilopo yang sebetulnya kita anggap pantas berbicara ternyata berhalangan. Fraksi kemudian mengusulkan, mengatur, dan memutuskan penggantian. Ibarat pemain sepakbola, ada nomor satu, nomor dua dan seterusnya dalam fraksi. Semua demi kepuasan bersama dan

sedapat mungkin memberi kesempatan kepada yang lain untuk turut memikirkan. Partai, dalam hal ini PNI, banyak mengajukan draft rencana undang-undang yang kemudian dijadikan usul inisiatif dan biasanya diterima DPR. Anggota-anggota DPR pun boleh berbicara apa saja di depan sidang. Mereka tidak bisa dituntut dan memiliki semacam kekebalan tertentu.

Bagaimana tanggapan pihak luar melihat kemajuan wanita Indonesia?

Saya pernah diundang Presiden Gamal Abdul Nasser akibat membuat resolusi mendukung nasionalisasi Terusan Suez. Beliau sangat ingin wanita Mesir mendapat kemajuan seperti di Indonesia, Pakistan, atau India. Tetapi dia khawatir karena masyarakat Mesir masih konservatif. Dia ingin memberi wanita hak untuk memilih dan dipilih. Kalau berhasil tidak apa-apa, tetapi bila gagal dia bisa dilecehkan kaum konservatif. Menurutnya, selama itu wanita selalu melihat apa yang selalu dipilih suami atau orang tua mereka. Wanita dianggapnya tidak akan mungkin terpilih. Saya kemudian memberi contoh bahwa Seksi Luar Negeri yang semua laki-laki memilih saya menjadi ketua. Jadi, tidak benar bila laki-laki tidak mau memilih wanita. Akhirnya Nasser mencoba dan berhasil terpilih dua wanita menjadi anggota parlemen. Malah semua negara Arab saya sarankan untuk menerima wanita politikus.

Rakyat Indonesia tampaknya tidak mempunyai masalah apakah nanti dipimpin oleh seorang wanita atau pria?

Rakyat tidak memiliki masalah untuk memilih wanita. Tidak ada bedanya, berdasarkan pengalaman, apakah organisasi dipimpin oleh seorang wanita atau pria. Saya selalu dipilih menjadi anggota atau ketua ini dan itu. Misalnya dalam PNI, saya menjadi salah satu anggota Dewan Partai PNI (Pengurus Pleno), anggota Dewan Pimpinan Partai PNI, dan pada tahun 1960-1966 menjadi anggota Badan Pekerja Kongres PNI. Saya pun ditugaskan untuk menjadi Ketua Seksi Luar Negeri di DPR. Saya tidak merasa minder, mereka juga tidak merasa superior. Artinya, tidaklah perlu dirasakan bahwa menghadapi

pria menjadi susah. Malah organisasi yang dipimpin wanita biasanya menjadi tenteram.

Menurut Anda kendala apa saja yang dihadapi wanita untuk berorganisasi?

Memang masih ada kendala seperti orang yang benci terhadap wanita yang berorganisasi. Mereka mengatakan bahwa rumah tangga wanita itu pasti akan berantakan karena harus ditinggalkan untuk kepentingan organisasi. Bagi saya, orang yang sungguh-sungguh berjuang pasti akan menyelesaikan semua urusan rumahtangganya sebelum dia keluar dari rumah. Kita dapat melihat wanita yang berorganisasi meninggalkan rumah dalam keadaan rapi dan anak-anaknya lebih terurus. Mereka yang sungguh-sungguh berpolitik justru mendahulukan urusan rumah tangga.

Kendala dari dalam rumah tangga sendiri?

Mungkin bapak-bapak kurang setuju bila misalnya kita datang terlambat. Tetapi asal urusan rumah sudah beres tidak menjadi masalah. Saya sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun saya tetap mengadakan kontak dengan anak-anak, misalnya memberi tahu saya sedang berada di mana. Mereka pun sering mengirim kawat permohonan restu. Di atas segalanya, walaupun berada di tempat yang jauh, saya selalu berdoa kepada Tuhan menitipkan anak-anak supaya mereka selamat dan diberi petunjuk. Suami pun bekerja seperti biasa. Tentunya aktivitas yang saya lakukan sudah melalui persetujuannya. Isteri mundur karena suami tidak mengizinkan, bukan karena dia tidak mampu. Semua ini bisa ditembus bila memang niat awal kita adalah menjadi politikus. Sekarang tergantung dari wanita untuk memilih. Tetapi umumnya bila sudah sampai *level* itu, suami akan setuju. Jadi, wanita berpolitik kini tidak ada lagi hambatan.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap isteri yang masuk dalam organisasi hanya karena jabatan atau posisi suami dalam sebuah instansi?

Sekarang ada Kowani, Perwari, Muslimat NU, Aisyah, dan lain-lain. Yang tidak ada ada-

lah barisan pemberontak. Dulu kita memiliki barisan pemberontak, yakni laskar wanita. Sebagian besar wanita sudah masuk organisasi yang merupakan bagian dari jabatan suami dan aktif menjalankan program. Tetapi bila suaminya mundur karena pensiun, mutasi atau dipecat mereka pun turut mundur. Apa yang sebelumnya sudah dilakukan dengan sendirinya tidak bisa diteruskan. Berbeda dengan organisasi yang "mandiri." Memang tidak mungkin dikatakan mandiri seluruhnya karena bila suami dipindah otomatis dia pun ikut pindah. Tugasnya hanya terbatas. Dia harus berpolitik yang sama dengan politik suaminya.

Jadi budaya Indonesia mendukung pria ataupun wanita untuk melakukan aktivitas politik?

Menurut saya begitu. Sejarah menunjukkan banyak wanita yang mampu memimpin bahkan menjadi ratu. Gajahmada mampu melanglang buana, tetapi di atasnya ada ratu yang mempunyai mahkota. Atau mengapa bukan suami Tjut Nyak Dhien yang memimpin Perang Aceh. Dia rela mengorbankan material dan spiritual membiayai perjuangan. Maluku juga memiliki banyak pahlawan wanita. Barangkali bila suami yang memimpin tidak seihklas seorang isteri. Tetapi peran wanita di masa silam itu ditutup-tutupi oleh sistem pendidikan yang dilakukan pemerintah kolonial dan Jepang. Karena itu sejarah sangat penting untuk diteliti. Kita tidak mau menjadikan masyarakat seperti pada zaman dulu.

Bagaimana pendapat Anda soal kasus atau skandal yang selalu mengkambinghitamkan wanita sebagai faktor penyebab?

Kalau sudah begitu salah keduanya. Misalnya, tuntutan aneh-aneh dari isteri memaksa suami untuk korupsi. Seharusnya suami tidak menuruti permintaan itu. Kalau sampai korupsi, seharusnya pasangan suami-isteri yang dipersalahkan. Sebaliknya, banyak penderitaan yang dialami isteri karena suaminya yang telah menjadi pejabat tinggi suka lupa. Bila dia jatuh karena kesalahan sendiri, orang masih seringkali menyalahkan sang isteri kenapa tidak bisa mengendalikan suami. Orang memang gampang menyalahkan

bahkan cenderung mengharapkan adanya kesesuaian di antara pasangan suami-isteri. Bagi yang berpolitik hal ini sulit dilakukan. Misalnya bila sang isteri menduduki jabatan strategis dan suaminya harus mengalah. Muncul semacam inferior kompleks. Jadi tergantung apakah suami mau menerima bila isteri sudah diangkat menjadi menteri.

Bagaimana tanggapan Anda soal kekerasan atau perdagangan wanita?

Partai-partai politik dulu pasti ikut berjuang dan bersama-sama melakukan protes bila ada masalah seperti itu. Mereka menganggap itu sudah melanggar agama dan menurunkan martabat bangsa. Bagi saya, perkosaan merupakan masalah nasional. Begitu pula dengan pelacuran wanita. Tidak ada pelacur wanita bila tidak ada pria yang datang. Perkosaan terang merupakan kesalahan pria. Ini sangat menyedihkan dan memerosotkan nama bangsa. Ini harus diperjuangkan bersama-sama dan tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Organisasi perempuan sehebat apapun tidak akan bisa melakukan sendiri, harus bersama-sama dengan pria.

Hanya sedikit organisasi wanita yang mempunyai perhatian pada soal kekerasan?

Kowani sudah sepakat untuk membahas dan menyelesaikan persoalan perkosaan. Sayangnya kalangan DPR berdiam diri. Hanya segelintir yang bersuara seperti petasan kecil meskipun hampir setiap hari bisa dibaca peristiwa-peristiwa kekerasan yang menimpa perempuan. Organisasi wanita seharusnya mengambil sikap dan melakukannya bersama-sama dengan organisasi lainnya. Untuk ini janganlah terlalu menekankan peran wanita saja. Semua yang dilakukan untuk perjuangan bangsa kenapa harus mengedepankan atau memakai embel-embel wanita atau pria. Perjuangan bangsa berarti bersatunya pria dan wanita. Tidak ada khusus wanita atau pria.

Bagaimana menurut Anda pandangan bahwa wanita tidak layak menjadi pemimpin bangsa?

Wanita-wanita zaman silam di Arab Saudi ikut memimpin peperangan. Atau ketika

Benazir diangkat sebagai perdana menteri Pakistan meskipun UUD negara ini berlandaskan Qur'an. PNI pernah mengajukan usul inisiatif undang-undang perkawinan yang lebih memperhatikan posisi kaum wanita, namun kemudian diserang oleh beberapa kyai. Saya pun menangkis serangan mereka dengan landasan argumentasi yang kuat. Kita harus mempunyai cukup keberanian untuk meluruskan sesuatu. Saya hanya ingin mereka tahu mana yang betul mana yang salah. Silakan memilih. Tapi pilihan yang diambil harus dengan keyakinan bahwa itu sudah betul.

Apakah wanita Indonesia pantas menjadi pemimpin nasional di masa depan?

Bisa saja bangsa ini dipimpin oleh seorang wanita. Banyak wanita Indonesia yang pintar dan hebat. Pokoknya kalau mereka mau maka jadilah. Menjadi usaha yang sia-sia menentukan kriteria, bila yang kemudian "jadi" malah wanita yang tidak pintar. Seorang anggota DPR pernah menunjukkan secara astrologis mengenai naik turunnya seorang pemimpin nasional. Dia bisa menunjukkan wanita-wanita Asia yang naik ke posisi puncak seperti Benazir Bhutto, Khaleda, Corry Aquino, dll. Tetapi dia tidak menerangkan apakah Indonesia juga akan mempunyai pemimpin nasional seorang wanita. Kita akan terima dan siapkan kalau memang wanita baik untuk nusa dan

bangsa. Untuk itu harus ditanyakan pada setiap orang Indonesia, entah wanita atau pria, apakah sudah siap. Jangan kalau wanita ditolak pria dan kalau pria ditolak wanita.

Apa saja kriteria yang harus dimiliki wanita Indonesia untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan?

Pokoknya siapa saja harus siap. Kriterianya, dia harus melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila sebaik-baiknya. Biarpun ilmunya setinggi langit, kalau tidak sanggup melaksanakan dengan baik UUD 1945 dan Pancasila akan percuma. Kriterianya bukan gelar, cantik, bangsawan, hartawan, dan lain-lain. UUD 1945 mengatakan tiap warga negara mempunyai hak dan kewajibannya sama di depan hukum. Kriterianya harus itu. Kalau terus ada diskriminasi berarti sudah tidak cocok. Seharusnya tidak boleh ada anak tiri atau warga negara kelas dua dalam politik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus diakui sebagai warga negara seutuhnya yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sekarang sering dikatakan bahwa yang Orba harus menang. Sementara masih hadir tuduhan-tuduhan yang mencap seseorang sebagai Orla, namun diharuskan ikut pemilihan umum. Mereka meminta suara, tetapi tidak mau mengakui sebagai sesama warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. ●

Masalahnya Hanya Kaitan Kesempatan dan Kemampuan

Aisyah Amini
Ketua Komisi I DPR-RI

Berdasarkan peraturan-peraturan Partai Persatuan Pembangunan, yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tidak ada pembatasan yang membedakan hak-hak dan kewajiban seorang kader partai. Untuk menjadi kader

partai, siapa saja boleh, baik pria maupun wanita. Tetapi kader dalam bidang politik tentu harus orang yang sudah dewasa.

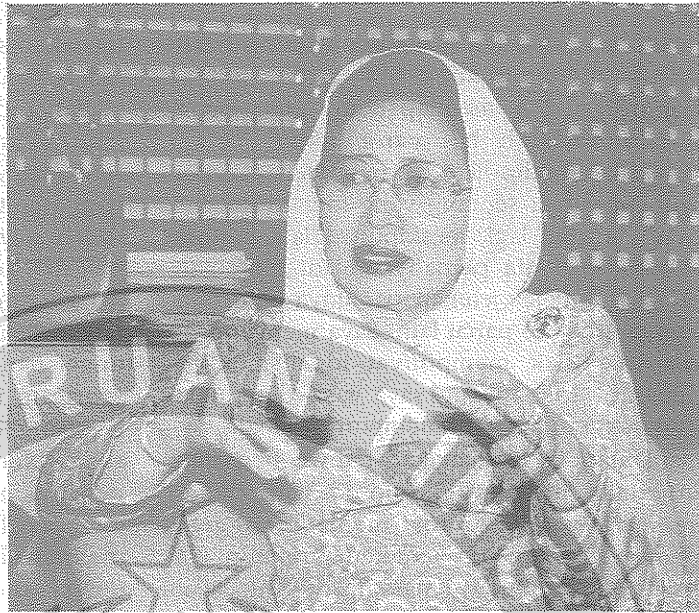
Dalam kenyataan tidak terlalu banyak wanita yang terjun ke dunia politik yang memulai dari bawah. Di sisi lain, beberapa

generasi muda wanita seringkali bertanya kepada saya bagaimana cara masuk partai supaya bisa menjadi anggota DPR. Terkesan seakan-akan partai hanya jalur untuk fasilitas duduk di dalam lembaga.

Saya menekuni aktivitas organisasi kemasyarakatan, yang sebetulnya bernuansa politik, sejak sekolah menengah. Saya terjun membela negara sebagai Ketua BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang) pada tahun 1948. Kegiatan yang kami lakukan saat itu sangat banyak, meskipun praktis tidak memiliki senjata. Kaum wanita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Ini merupakan masalah kesadaran dan tanggung jawab bersama membela bangsa dan mempertahankan negara.

Tentara Belanda saat itu mencari pejuang laki-laki. Tetapi Belanda selalu sulit membedakan mana tentara resmi dan rakyat biasa. Tentara kita pun biasanya tidak memakai seragam dan tanda pangkat, mereka membaur dengan rakyat. Karena itu bila ada tanda-tanda Belanda masuk ke wilayah Republik, laki-laki menghindari ke gunung atau perbukitan, yang tinggal hanyalah wanita.

Kita juga menanamkan keyakinan kepada masyarakat bahwa bangsa dan negara Indonesia masih eksis. Sebagai wartawan perang, saya bekerja bermacam-macam, termasuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita masih mempunyai pemimpin dan terus melakukan perjuangan. Hal demikian membangkitkan semangat rakyat, sehingga mereka pun bersedia membantu dengan *supply* makanan. Kita tidak mungkin mengharapkan rakyat membantu perjuangan dengan apa yang mereka miliki jika mereka sendiri tidak yakin bahwa negara masih ada. Jadi, tugas wanita adalah menyiapkan makanan untuk tentara kita yang berada di gunung dan terus-menerus memompa semangat masyarakat desa. Kalau mereka tidak bersemangat, tentu akan melemahkan perjuangan. Semua ini sebetulnya perjuangan politik demi kepentingan negara.



Aisyah Amini

Saya sangat mengharapkan bagaimana generasi muda mau terjun ke politik tetapi jangan langsung melihat fasilitas. Beberapa sarjana yang baru lulus bertanya kepada saya apakah mereka harus terjun ke politik atau ke profesi. Saya mengatakan bahwa profesi harus lebih dulu dimantapkan. Boleh saja terjun ke dunia politik, tetapi jangan menjadikannya sebagai profesi, dalam arti mencari tempat hidup. Politik selalu bergulir dan kita tidak tahu kapan menjadi pimpinan serta kapan terlempar. Karena itu saya sangat mengharapkan janganlah menjadikan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik sebagai tempat mencari penghidupan.

Pendirian saya sejak awal adalah alangkah baiknya terjun ke dunia politik setelah kita mempunyai basis kekuatan sebagai profesional, mempunyai penghasilan sendiri yang tidak menggantungkannya pada kegiatan politik. Kegiatan politik adalah untuk mendukung dan memperjuangkan idealisme. Bila kita menggantungkan segalanya dalam bidang politik yang pasti ditemukan hanyalah kekecewaan, sebab tatkala pendirian kita tak sejalan dengan pendirian orang lain atau pemerintah kemudian kita sendiri tidak berani bicara artinya sama saja dengan tidak melakukan apa-apa.

Saya aktif di Partai Muslimin Indonesia

sejak pimpinan tingkat pusat tahun 1967-1968. Politik adalah suatu bidang pengabdian untuk memperjuangkan cita-cita. Bahwa kemudian kita mendapatkan suatu penghasilan adalah hal yang wajar. Tetapi janganlah itu dijadikan sasaran utama. Contoh lain, misalnya seorang yang merasa kecewa tidak terpilih lagi, meskipun dalam periode sebelumnya dia pernah menjadi pimpinan, lantas menjelek-jelekan partainya atau bahkan pindah ke partai lain. Saya menganggap dia ini tidak mempunyai idealisme perjuangan. Inilah yang saya rasa diperlukan generasi muda yakni mempunyai idealisme.

Dalam PPP dikatakan bahwa berpolitik itu adalah ibadah. PPP pun tidak membatasi seorang wanita untuk menjadi anggota, pengurus, sekretaris, atau ketua. Namun, kita harus melihat budaya masyarakat yang masih menganggap pria lebih pantas berada dalam posisi *top*. Misalnya, kita tidak pernah mendengar DPRD mengajukan seorang wanita untuk menjadi gubernur atau bupati. Posisi ini dianggap lahan pria. Hal demikian memerlukan waktu untuk membudayakan bahwa tugas kenegaraan tidak tergantung pada jenis kelamin seorang, tetapi tergantung kemampuannya dan kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap dirinya. Kepercayaan bisa tumbuh bila dia memang memperlihatkan kemampuan-kemampuannya.

Sementara ini ada kesan, dan sering dikatakan, bahwa wanita bisa menduduki suatu jabatan bila dia mempunyai kemampuan lebih daripada pria. Misalnya, jabatan A harus satu orang sedangkan yang potensial menduduki jabatan itu adalah pria dan wanita. Dalam hal ini akan didahulukan pria, kecuali jika wanita mempunyai kelebihan yang lebih daripada si pria. Wanita sering dikalahkan untuk menduduki posisi itu. Kadang-kadang mengharuskan lebihnya itu banyak sekali, baru dia mampu untuk kesempatan yang sama. Dengan kualitas yang melebihi, baru wanita mampu untuk mendapatkan kesempatan itu.

Dalam Islam tidak ada larangan wanita untuk menduduki jabatan-jabatan kemasyarakatan dan kenegaraan. Contohnya, Aceh sekitar abad ke-16 pernah beberapa kali memiliki kepala pemerintahan wanita, *sultanah*.

Juga misalnya di negara yang jelas-jelas mengatakan sebagai negara Islam seperti Bangladesh dan Pakistan. Perdana menteriya adalah seorang wanita dan tidak ada dunia Islam yang memprotes. Malah budaya setempat yang seringkali menjadi *bandicap* bagi wanita untuk lebih maju. Bahkan ada istilah *swarga nunut neraka katut* (ke surga ikut dan ke neraka pun terbawa).

Kadang-kadang orang tua sering melontarkan "nasehat," untuk apa sekolah tinggi-tinggi nanti akhinya ke dapur jua. Hal-hal semacam ini masih banyak dan terus berlangsung dalam masyarakat kita. Sekarang sudah banyak yang berubah dilihat dari segi pendidikan. Semakin banyak wanita yang memperoleh pendidikan bahkan sampai memperoleh gelar guru besar. Berbeda dengan di masa silam di mana rasio laki-laki dan perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi sangat tidak proporsional. Kita cukup bangga dengan kemajuan pendidikan yang diraih wanita sekarang.

Penguatan Landasan

Dunia politik masih dirasa tidak sejalan dengan kelemahan-lembutan wanita. Wanita dianggap lemah lembut, sedangkan politik dianggap dunia keras yang tidak sejalan dengan wanita. Persaingan dalam dunia politik amat keras, tetapi terjun ke dunia politik mempunyai nikmat tersendiri. Rasanya kita berhasil dengan cita-cita semula yang menyentuh banyak orang. Berbeda misalnya bila kita berprofesi sebagai pengacara. Memenangkan suatu perkara tentu kita merasa senang dan bahagia dapat membantu, tetapi bidang profesi ini hanya menyentuh beberapa orang.

Saya kebetulan pernah menjadi Tentara Pelajar. Saya dekat dengan perjuangan di medan perang dan garis depan. Perjuangan di medan perang adalah perjuangan yang maha berat dan keras. Perjuangan itu dilakukan untuk mempertahankan suatu yang benar, sesuatu yang menjadi hak kita. Artinya, berjuang bersama-sama ABRI merupakan hal yang sudah lazim saya lakukan. Juga tatkala G30S, saya merasa dekat dengan Bapak Sarwo Edhi. Beliau bahkan memberi saya baju loreng.

Saya merasakan betapa pahitnya menghadapi PKI. Masyarakat saat itu selalu dibayangi ketakutan. Pemilik tanah di desa dicekam ketakutan karena jargon-jargon PKI yang sangat keras dan bila perlu menghancurkan. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya yang telah menempa sehingga saat G30S PKI saya merasakan bersyukur Tuhan telah menolong dan ikut bersama-sama kekuatan lain menghabiskan era PKI di Indonesia. Jadi, bagaimana generasi muda meyakini bahwa sikap komunis sangat tidak cocok dengan bangsa kita yang religius, yang menginginkan kehidupan memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta tidak melakukan kekerasan. Sehingga kedekatan dalam perjuangan dengan ABRI, tampaknya membuat fraksi mempercayai saya untuk ikut memimpin Komisi I dan saya terima dengan mengucap *bismillah*.

Meskipun Komisi I jarang berangkat ke luar negeri, sebagai pimpinan Komisi saya sering berhubungan dengan negara asing melalui duta-duta besar mereka. Kehadiran saya sebagai Ketua Komisi I memang menjadi perhatian mereka. Jangankan pihak luar negeri. Saya pernah memimpin komisi ke daerah, protokol di daerah mengatur tempat sedemikian rupa sehingga saya dipindah ke ruangan lain. Waktu Gubernur mulai bicara dan menyampaikan bahwa yang memimpin Komisi adalah Ibu Aisyah Amini, baru saya dipanggil kembali. Jadi, kembali dalam pikiran banyak orang, gambarannya yang akan memimpin Komisi selalu pria.

Budaya semacam ini akan berubah dengan semakin banyaknya memberi kesempatan pada wanita. Sekali lagi tergantung pada kesempatan. Kalau kesempatan itu tidak ada, dan tidak ada kesediaan dari pihak pria untuk memberikannya, susah akan berubah. Tetapi kalau misalnya sudah ada kesempatan, makin lama orang akan melihat dan menganggap wajar. Bila yang menjadi Ketua Komisi I adalah seorang wanita pertama-tama dianggap lain, tetapi lama-kelamaan menjadi terbiasa. Memang selama ini di DPR belum pernah ada wanita yang memimpin. Soal kemampuan seorang wanita untuk memimpin sebuah Komisi terserah pada penilaian orang.

Tentang skandal atau kasus yang me-

libatkan wanita yang kemudian menjatuhkan seseorang dari jabatan di pemerintahan yang kemudian dijadikan isu politik seharusnya dikembalikan pada agama. Dasar pendidikan agama selalu melandasi setiap pikiran dan langkah saya. Agama telah memberi ajaran serta petunjuk selain juga dikatakan bahwa Tuhan memberi akal, pikiran, dan perasaan kepada setiap manusia. Dengan akal dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Manusia berpikir untuk melihat secara jernih mana yang benar dan mana yang salah. Dalam dunia konkret pun manusia diberikan ujian-ujian dalam berbagai bentuk. Misalnya, orang kaya diuji dengan kekayaannya. Sebagai orang kaya dia ditugaskan oleh Tuhan harus memperhatikan orang miskin baik dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah serta upaya lain supaya tidak terjadi kesenjangan. Orang miskin pun juga mendapat ujian, mampukah dia menghadapi kemiskinan namun tidak kehilangan iman.

Menjadi pemimpin juga menghadapi berbagai ujian. Misalnya kasus seorang ulama yang menikah di bawah tangan. Dia ini mendapat ujian dalam bentuk godaan. Wanita yang menikah *mut'ah* dengannya juga diuji. Kalau imannya kuat, dia tentunya akan bertanya, atau bahkan curiga, kenapa menikah harus dengan sembunyi-sembunyi. Apalagi di tengah kecenderungan masyarakat Indonesia belakangan ini yang merayakan pesta pernikahan secara besar-besaran dan malah berlebihan. Jadi, wanita atau pria bila tidak menggunakan akal sebaik-baiknya memang patut dipersalahkan. Saya tidak sepakat bila wanita yang harus selalu disalahkan. Kesalahan itu ada pada kedua belah pihak. Terutama dalam kehidupan kota-kota besar, saya kira setiap orang mempunyai kemampuan untuk berpikir secara jernih. Bila dia mempunyai bekal pendidikan agama pasti akan digunakannya untuk mengontrol diri.

Lain halnya dengan perkosaan. Masalah perkosaan memang bukan kemauan satu pihak. Terkadang yang disalahkan kaum wanita karena dikatakan berpakaian "mengundang" atau "murahan." Tetapi ini bukan satu-satunya penyebab sehingga terjadi perkosaan. Banyak pria yang melakukannya

karena masalah-masalah lain, seperti menghilangkan jejak perampokan dengan cara memperkosa, karena iseng atau pengaruh minuman keras. Artinya, banyak sekali penyebab sehingga terjadi perkosaan kaum pria terhadap wanita. Dalam hal ini jelas pihak pria harus disalahkan. Untuk itu kita menuntut supaya hukuman diberlakukan maksimum. Pengadilan jangan memberi hukuman terlalu rendah sehingga terkesan perkosaan bukan hal yang serius. Saya kira yang penting adalah bagaimana nilai ajaran agama ditanamkan sedini mungkin kepada setiap orang dan memberi keyakinan bahwa hidup adalah perjuangan.

Posisi Langka

Posisi tertinggi dalam sebuah negara sangatlah langka dan jumlahnya hanya satu. Indonesia selama 50 tahun dipimpin oleh dua orang presiden. Presiden yang pertama dianggap menyeleweng lalu dijatuhkan oleh MPR. MPR kemudian mencari orang. Saat pertama kali dipilih, presiden yang kedua ini belum dan tidak mau. Ketidakuannya barangkali karena falsafah *mikul duwur mendem jero*. Artinya, untuk jabatan tertinggi itu saya kira tergantung dari pikiran, penilaian dan pilihan rakyat siapa yang paling pantas dan mampu. UUD 1945 jelas tidak melarang siapapun orangnya dapat menduduki posisi itu. Memang tidak mudah ditentukan. Sampai sekarang saja orang masih bertanya bagaimana tahun 1998 nanti. Walaupun ada wakil presiden dan para menteri, tetapi mencari orang yang pantas menduduki jabatan puncak itu tidaklah mudah.

Saya tidak melihat ada yang paling menonjol sebagai satu-satunya calon presiden. Sebelum terjadinya peristiwa G30S jarang sekali orang mendengar nama Bapak Soeharto. Walaupun beliau pernah memimpin Serangan Umum 1 Maret, tetapi tidak begitu banyak masyarakat yang tahu. Peranan beliau terlihat jelas saat peristiwa G30S. Dengan kepemimpinan yang dimiliki, dia mampu menghadapi segala macam masalah, bahkan pada titik tertentu berbeda pendapat dengan Bung Karno. Rakyat pun akhirnya memilih Bapak Soeharto sebagai pemimpin.

Saya tidak mengatakan bahwa belum saatnya wanita memimpin negeri ini. Kalau memang datang saatnya, orang pasti akan melihat hadirnya orang yang tepat. Pada waktu nanti, bila ada kesempatan, dalam pemilihan presiden mungkin ada yang melihat. Saya tidak apriori mengatakan belum saatnya. Orang akan melihat siapa yang tepat, apakah seorang pria, ABRI atau wanita. Sekarang orang belum melihat dan masih bertanya-tanya siapa yang paling tepat menjadi presiden. Yang terlihat hanya Presiden Soeharto dan beliau sendiri memang masih sehat.

Sebetulnya Bung Karno menginginkan wanita untuk maju, misalnya tertuang dalam *Sarinah*. Dia bahkan mengadakan semacam kursus dan pelbagai ceramah politik untuk wanita. Wanita sangat diharapkan menyongsong kemajuan. Namun, kita perlu menengok sejarah bangsa kita sejak zaman penjajahan sampai kemerdekaan yang mengalami berbagai macam proses. Sejak zaman perjuangan untuk kemerdekaan, sebetulnya wanita sudah ikut dalam bidang politik. Bahkan wanita diberikan kesempatan untuk duduk dalam *volksraad*. Dalam UUD 1945, kita tidak melihat adanya diskriminasi antara pria dan wanita.

Hambatan wanita untuk maju tentunya bukan hanya karena faktor budaya. Di sini banyak persoalan yang saling berkait seperti pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dedikasi, dan kesempatan. Walaupun sudah memiliki pendidikan, pengalaman, dan dedikasi, akan percuma bila tidak ada kesempatan. Begitu pula sebaliknya. Walaupun kesempatan sudah diberikan, tetapi tidak ada kemampuan, pendidikan, pengalaman, dan dedikasi juga tidak akan berhasil. Semua ini harus berkembang.

Wanita pada zaman Belanda, bahkan sampai dengan tahun 1950-an, masih sangat jarang mengenyam pendidikan. Jumlah wanita yang masuk sekolah dan memperoleh pendidikan memadai relatif rendah. Keluarga di wilayah pedesaan masih banyak yang tidak memasukkan anak wanitanya ke sekolah. Sekolah dengan Wajib Belajar 9 tahun bagaimanapun berkaitan erat dengan soal ekonomi. Untuk bersekolah sang anak harus mempunyai baju seragam, buku tulis, buku

cetak, pena, pensil, diktat, dan alat tulis lainnya. Sedangkan bila di rumah dia bisa membantu meringankan kerja orang tua. Jadi tingkat ekonomi juga tidak mendukung. Namun, hasil-hasil pembangunan yang salah satunya ditunjukkan oleh *income* yang sudah semakin membaik, kesempatan menyekolahkan anak juga lebih terbuka. Untuk menduduki jabatan tertentu setiap orang harus memiliki kemampuan yang dimulai dari pendidikan. Hanya orang jenius, yang langka dan jarang, tanpa pendidikan bisa mencapai posisi-posisi penentu.

Kriteria yang harus dimiliki wanita Indonesia untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan sangat jelas. Dia harus mempunyai kemampuan. Kemampuan itu harus didukung oleh pendidikan, dedikasi, dan pengalaman. Masyarakat pun harus menganggap dia mempunyai kemampuan. Berikutnya adalah kesempatan yang tersedia. Walaupun ada kesempatan, tetapi dia tidak mampu tentu tidak bisa. Walaupun mempunyai kemampuan, pengetahuan, penampilan memadai, tetapi kalau tidak ada kesempatan juga tidak bisa apa-apa.

Upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas wanita untuk duduk dalam DPR memang bisa dilakukan. Tetapi ini sangat tergantung dari pimpinan organisasi sosial politik bersangkutan. Sistem pemilihan yang selama ini kita pakai bukan secara langsung tetapi melalui daftar. Pimpinan partai yang menentukan siapa saja yang dapat masuk dalam sistem daftar itu. Jadi tergantung pimpinan dan juga sumber daya manusia. Walaupun pimpinan partai ingin menambah porsi wanita di dalam parlemen, tetapi sumber daya manusianya terbatas *toh* tetap tidak bisa ditampilkan.

Khusus bagi PPP, kami juga merasakan betapa sulitnya melakukan rekrutmen, selain karena keterbatasan internal juga hadirnya keterbatasan formal. Misalnya, banyak wanita pada masa silam yang berasal dari berbagai

macam profesi masuk ke dalam partai politik. Sekarang ini banyak wanita yang sudah terjun dalam kegiatan kemasyarakatan atau kenegaraan, misalnya sebagai pegawai atau isteri seorang pegawai. Semua isteri pegawai negeri diikat dalam Korpri dan Dharma Wanita. Ini merupakan salah satu *handicap* kami. Walaupun jumlah pegawai negeri tidak banyak, tetapi bila ditambah dengan keluarga yang terjun di situ tentu menjadi sangat berarti. Jadi, kendala internal kita adalah lingkungan keluarga masing-masing, lingkungan budaya, dan juga kebutuhan.

Adapula keseganan untuk memasuki partai politik. Kalau masuk partai, apalagi di kota kecil atau desa, dia akan mengalami banyak kesulitan. Pernah kami berbincang dengan kawan-kawan di sebuah universitas, kemudian masuk ke dalam ruangan seorang dosen yang diketahui memilih PPP. Perbincangan terhenti karena bisikan untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Seakan-akan pengajar itu dikucilkan. Itu juga merupakan salah satu kendala bagi orang untuk apa masuk partai politik. Kendala berikutnya dalam penyebaran kartu anggota. Kita sulit menyebut bila ditanya berapa anggota PPP yang

sudah mempunyai kartu anggota, karena orang masih enggan menyebutkan dirinya anggota PPP.

Dalam sistem politik Demokrasi Pancasila seharusnya tidak demikian. Tetapi dalam praktek, jegal-jegalan tetap berlangsung. Seharusnya setiap orang, termasuk pegawai negeri, bebas menentukan pilihan. Sebab sekali dia menjadi anggota partai dan dia adalah pegawai negeri yang melayani masyarakat, akibatnya orang diperlakukan secara diskriminatif. Dalam bidang usaha, masih banyak anggota PPP yang mengalami kesulitan. Hal-hal demikian seharusnya dihilangkan. Karena itu kita pun selalu mengatakan kepada seluruh anggota PPP untuk terus berjuang. ●

Kriteria yang harus dimiliki wanita Indonesia untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan sangat jelas. Dia harus mempunyai kemampuan. Kemampuan itu harus didukung oleh pendidikan, dedikasi, dan pengalaman.